

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan sektor pariwisata mengalami kemajuan yang cukup pesat di daerah globalisasi dan keterbukaan informasi. Pariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar didunia dan merupakan andalan utama dalam menghasilkan devisa di berbagai negara. Beberapa negara seperti Thailand, Singapura, Filipina, Maladewa, Hawaii, dan Karibia sangat tergantung dengan devisa yang di dapat dari kedatangan wisatawan (Pitana, 2005:3). Sektor pariwisata menjadi urat nadi perekonomian dibanyak negara.

Banyak manfaat dari dunia pariwisata yang secara signifikan mempunyai dampak pada perkembangan perekonomian suatu negara. Selain peningkatan devisa negara, pariwisata juga berperan dalam bentuk perluasan lapangan kerja, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemiskinan dan pemerataan pembangunan spasial. Pariwisata muncul sebagai salah satu kekuatan dan harapan bagi pemulihan kembali pembangunan nasional (Hendri dalam Fandeli, 2000:33).

Indonesia adalah negara yang penuh dengan keindahan alam yang ada di dalamnya, mulai dari ujung timur sampai ujung barat memiliki keindahan yang beraneka ragam. Seluruh keindahan itu tidak hanya memukau kita tetapi juga orang-orang dari penjuru dunia. Pariwisata diindonesia merupakan sektor usaha yang mempunyai peran penting dalam menambah devisa negara dan lapangan pekerjaan, hal ini terlihat dari kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata sangat besar bagi negara dan juga banyaknya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang tercipta dengan adanya kawasan wisata disuatu tempat.

Terdapat beberapa sumber pendanaan pembangunan baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri ( Suparmoko, 1992:94-95).

1. Pendapatan pajak, adalah iuran dari masyarakat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa secara langsung.
2. Retribusi, adalah pemberian dari masyarakat kepada pemerintah dimana terdapat hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembiayaan retribusi tersebut.
3. Keuntungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
4. Sumber pendanaan dari luar negeri, adalah bantuan atau hibah yang diperoleh dari pinjaman luar negeri dan penanaman modal asing (PMA).

Demi tercapainya cita-cita dan tujuan untuk mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka pemerintah dalam melaksanakan pembangunan seharusnya tidak terbatas pada sektor perekonomian semata, namun sektor-sektor lain yang terkait juga harus di upayakan pembangunannya. Salah satu sektor yang tergantung dengan sektor lain adalah sektor pariwisata yang sangat tergantung pada stabilitas nasional dan jaminan keamanan, tetapi masih belum terlalu diperhatikan dan digarap secara maksimal.

Negara Indonesia memiliki potensi alam keanekaragaman flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang semuanya merupakan sumber daya modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Modal tersebut harus dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan data statistik, tercatat bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Tahun 2002 target

perolehan dari sektor pariwisata sebesar 516,035,600 juta, dan tahun 2003 sebesar 606,563,875 juta, sedangkan target 2004 sebesar 610,164,775 juta. Dengan potensi wisata yang dimiliki masih memungkinkan peluang peningkatan penerimaan negara dari sektor pariwisata.

Meskipun demikian, sektor pariwisata sangat rentan terhadap faktor-faktor lingkungan alam. Keamanan, dan aspek global lainnya. Contoh kerusakan alam adalah rusaknya terumbu karang hampir disepanjang pantai Indonesia. Padahal terumbu karang dan segala kehidupan yang ada didalamnya merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki dan tidak ternilai harganya. Sebagai contoh lainnya perkembangan-perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan politik global mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan pariwisata.

Kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran serta pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu: perencanaan (*planning*) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (*development*) fasilitas utama dan pendorong pariwisata, pengeluaran kebijakan (*pollicy*) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan (*regulattion*).

Selain peran pemerintah sebagai fasilitator ternyata peran masyarakat juga berpengaruh. Dimana masyarakat merupakan sekelompok orang yang berada disuatu wilayah geografi yang sama dan memanfaatkan sumber daya alam lokal yang ada disekitarnya. Dinegara maju dan berkembang, pada umumnya pariwisata dikelola oleh kalangan swasta yang memiliki modal usaha yang besar yang berasal dari luar daerah dan bahkan luar negeri. Sehingga masyarakat lokal yang berada disuatu daerah destinasi atau tujuan pariwisata tidak dapat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata. Ketidak terlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata sering kali menimbulkan opini bahwa masyarakat lokal bukan termasuk *stake olders* dari

pariwisata dan merupakan kelompok yang termarginalisasi dari kesempatan bisnis dalam bidang pariwisata.

Pada dasarnya masyarakat lokal memiliki pengetahuan tentang fenomena alam dan budaya yang ada disekitarnya. Namun mereka tidak memiliki kemampuan secara finansial dan keahlian yang berkualitas untuk mengelolanya atau terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata yang berbasis alam dan budaya. Sejak beberapa tahun terakhir ini, potensi-potensi yang dimiliki masyarakat lokal tersebut dimanfaatkan oleh para pengelola wilayah yang dilindungi ( *protected area* ) dan pengusaha pariwisata untuk diikuti sertakan dalam menjaga kelestarian alam yang ada didaerahnya.

Sehingga diharapkan masyarakat lokal ikut terlibat secara aktif dalam pengembangan pariwisata lebih jauh, pariwisata juga diharapkan memberikan peluang dan akses kepada masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha pendukung pariwisata seperti; toko kerajinan, toko cinderamata, warung makan dan lain-lain agar masyarakat lokalnya memperoleh manfaat ekonomi yang lebih banyak dan secara langsung dari wisatawan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pariwisata sangat berbeda dan ini tergantung dari jenis potensi, pengalaman, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh individu atau masyarakat lokal tersebut.

Selain masyarakat dalam menjalankan perannya, industri pariwisata harus menerapkan konsep dan peraturan serta panduan yang berlaku dalam pengembangan pariwisata agar mampu mempertahankan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang nantinya bermuara pada pemberian manfaat ekonomi bagi industri pariwisata dan masyarakat lokal. Industri-industri pariwisata yang sangat berperan

dalam pengembangan pariwisata adalah: biro perjalanan wisata, hotel dan restoran. Selain itu juga didukung oleh industri pendukung pariwisata lainnya.

Kebijaksanaan pembangunan kepariwisataan nasional dan daerah ini diarahkan menjadi andalan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi dan sekaligus dapat berperan dalam menciptakan peluang lapangan dan kesempatan kerja (yayasan diakoni gloria, 2002). Pembangunan kepariwisataan merupakan salah satu sektor andalan pembangunan suatu daerah. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk penguasaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usah yang terkait dibidang tersebut. Pembangunan sektor kepariwisataan diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan memperbaiki kesejahteraan hidup masyarakat. Berbagai program partisipasi dan bantuan pembangunan kepariwisataan telah dilakukan di beberapa daerah oleh lembaga Internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga ilmiah, lembaga swadaya masyarakat, swasta dan perorangan guna menunjang pengembangan sektor kepariwisataan disuatu daerah.

Sebagai wujud ekonomi, maka daerah istimewa yogyakarta diharapkan mampu untuk mengelola perekonomiannya sendiri. Sehingga pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dinilai dapat memberika sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Yogyakarta. Dimana otonomi daerah sebagai wujud

pelaksanaan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, yang mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik. Yang pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan pelayanan masyarakat. (2) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah.

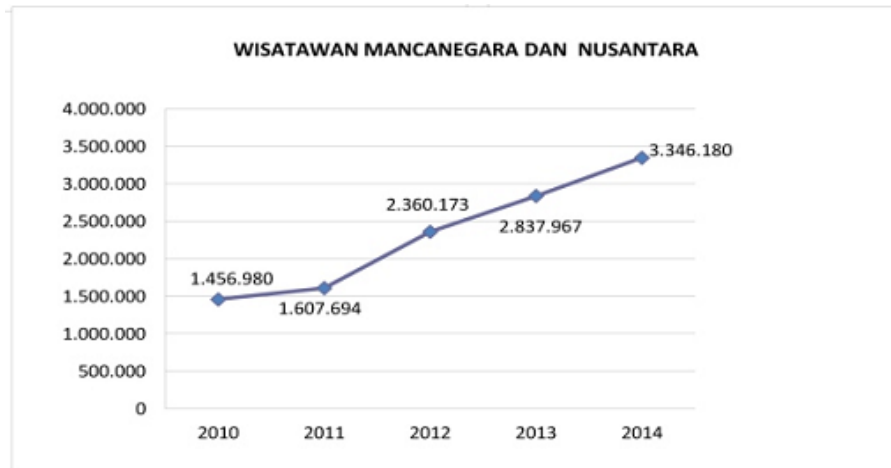
Dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002:47). Undang – undang tentang otonomi daerah yaitu undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Otonomi daerah ditempatkan secara utuh pada daerah kabupaten dan kota. Kehadiran dua paket undang-undang tersebut menjanjikan sebuah harapan sekaligus tantangan pemerintah daerah. Untuk dapat memainkan peran dengan baik dan kompetisi global, salah satu strategi yang paling efektif adalah berperan dengan lebih aktif dalam memanfaatkan potensi pariwisata yang tidak kalah menarik. Berbagai obyek wisata yang ada di Yogyakarta apabila dikembangkan secara optimal akan memberi kontribusi positif bagi Yogyakarta.

Agar mempermudah sektor pariwisata pemerintah dalam mengelolah pariwisata maka dibentuk dinas pariwisata. Dinas pariwisata adalah salah satu unsur pelaksanaan program dari pemerintah dibidang pariwisata dan didalam menjalankan kegiatan berkewajiban membuat laporan pelaksanaan tugas. Laporan pelaksanaan tugas adalah salah satu faktor penting yang sangat menentukan suatu kebijaksanaan pelaksanaan program pemerintah yang akan memperjelas visi dan misi kedinasan, sehingga mempermudah menentukan arah kebijaksanaan yang akan dilaksanakan dan sebagai evaluasi pelaksanaan kegiatan dari program-program yang telah ditentukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang dianggap mempunyai potensi daerah yang dapat digunakan sebagai penyelenggaraan obyek pariwisata. Dimana pariwisata sebagai salah satu potensi unggulan di DIY membutuhkan pengelolaan yang baik dan terencana agar memperoleh hasil yang optimal bagi daerah dan layak

menjadi potensi unggulan yang dibanggakan. Hal ini dapat ditunjukkan melalui jumlah wisatawan dari tahun 2010- 2014 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2014**



*Sumber : Dinas pariwisata DIY*

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa jumlah pengunjung yang paling banyak terdapat pada tahun 2014. Dari tahun 2010-2013 terdapat peningkatan jumlah pengunjung secara terus-menerus. Agar usaha pemerintah DIY dapat berjalan dengan baik sesuai program dan visi yang telah dibuat maka saat ini perlu untuk menjalin kerjasama dengan daerah lain serta beberapa pemilik travel wisata dalam rangka melakukan promosi wisata. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah pariwisata merupakan sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Sehingga judul penelitian ini yaitu **“Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, jumlah usaha pariwisata dan sarana pendukung dan jumlah obyek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata pada kabupaten/ kota di Provinsi DIY tahun 2008-2015”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada kabupaten/ kota di Provinsi DIY.
2. Apakah jumlah usaha pariwisata dan sarana pendukung berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada kabupaten/ kota di Provinsi DIY.
3. Apakah jumlah obyek wisata berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada kabupaten/ kota di Provinsi DIY.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada kabupaten/ kota di Provinsi DIY?
2. Mengetahui pengaruh jumlah usaha pariwisata dan sarana pendukung berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada kabupaten/ kota di Provinsi DIY?
3. Mengetahui pengaruh jumlah obyek wisata berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada kabupaten/ kota di Provinsi DIY?



#### **D. Manfaat Penelitian**

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Hasil penelitian dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan pada sektor pariwisata guna meningkatkan pendapatan daerah.
2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi pendukung untuk melakukan penelitian sejenis secara lebih mendalam dan luas ruang lingkungannya.